



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGGAJIAN PPPK DALAM DANA ALOKASI UMUM TA. 2024



PERLU PERHATIAN DARI UU NO 1/2022: HKPD

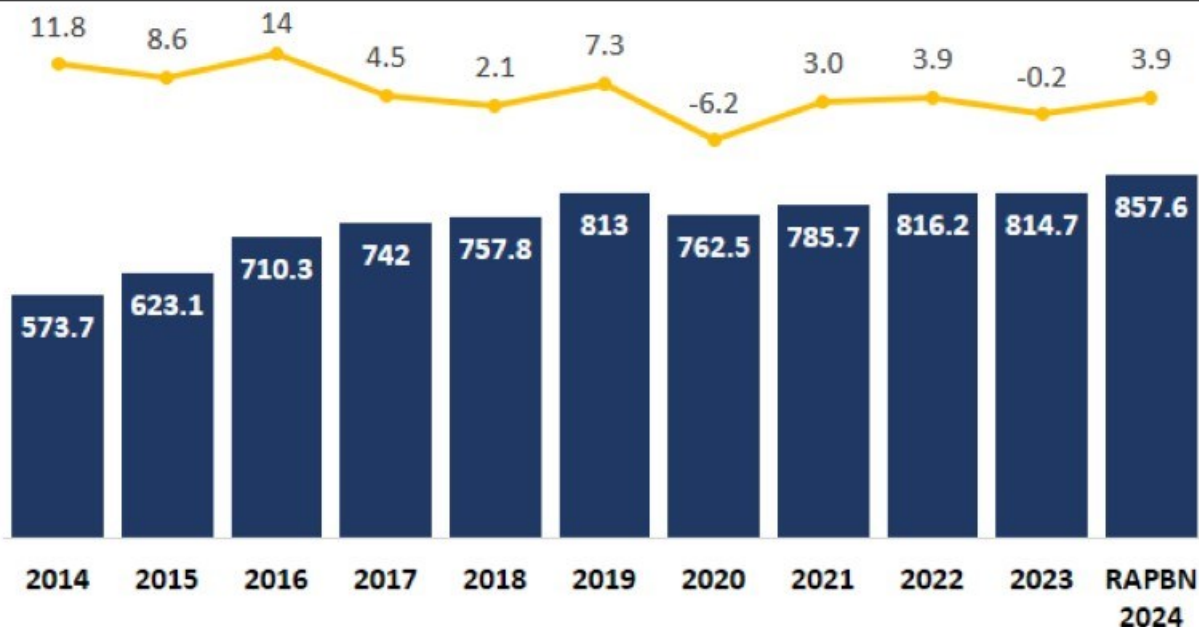
- **Pasal 146: Batasan besaran belanja pegawai (maksimum 30% dr APBD tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD, masa transisi 5 tahun);**
- **Pasal 147: Batasan besaran belanja infrastruktur pelayanan publik (minimal 40% dr APBD diluar transfer ke daerah bawahan dan desa, masa transisi 5 tahun).**



KEBIJAKAN UMUM TKD TAHUN 2024

ALOKASI TKD TERUS MENGALAMI KENAIKAN DAN MENINGKAT MENJADI RP857,6 T UNTUK TA 2024

Diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan



Peningkatan TKD terutama untuk menampung kebijakan prioritas sbb:

- Dukungan penggajian PPPK Daerah dan kenaikan gaji pokok ASN Daerah.
- Peningkatan pelayanan publik di daerah.
- Dukungan operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan.
- Dukungan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.

KEBIJAKAN UMUM TKD 2024

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD.
3. Memperkuat penggunaan *earmarking* TKD pada sektor prioritas.
4. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD mendukung pencapaian program prioritas nasional.
5. Menerbitkan pedoman/juknis dan regulasi yang terintegrasi dan tersinkronisasi sebelum tahun anggaran dimulai.
6. Meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengatasi stunting, kemiskinan, inflasi, dan investasi.
7. Mendorong pemda agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi.



POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2024 (dalam triliun Rupiah)

URAIAN	2021	2022	2023	2024
	realisasi	realisasi	Perpres 130/2022	RUU APBN 2024/Nota Keuangan
1. Dana Bagi Hasil	117,2	168,4	136,3	143,10
2. Dana Alokasi Umum	377,8	378,0	396,0	427,7
- DAU tidak ditentukan penggunaannya	377,8	378,0	286,8	343,5
- DAU ditentukan penggunaannya :			109,2	84,2
▪ Penggajian Formasi PPPK			25,7	15,7
▪ Pendanaan Kelurahan			1,7	1,7
▪ Pendanaan Layanan Publik			81,8	66,8
3. Dana Alokasi Khusus	184,6	173,2	185,8	188,1
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	57,1	54,8	53,4	53,8
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	127,6	118,4	130,3	133,8
c. Hibah ke Daerah			2,1	0,5
4. Dana Otonomi Khusus	19,5	20,4	17,2	18,3
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,3	1,3	1,4	1,4
6. Dana Desa	71,8	67,9	70,0	71,0
7. Insentif Fiskal	13,5	7,0	8,0	8,00
TOTAL TKD	785,7	816,2	814,7	857,6

Penjelasan Pagu Anggaran TKD TA 2024, terdapat:

- **Penambahan pagu:**
 - ✓ DAU sebesar **Rp31,7 T**
 - ✓ Dana Otsus sebesar **Rp1,1 T**
 - ✓ DAK Fisik sebesar **Rp0,4 T**
 - ✓ DAK Nonfisik sebesar **Rp3,5T**
 - ✓ Dana Desa sebesar **Rp1 T**
- **Penambahan alokasi DAU diarahkan untuk dukungan kebijakan kenaikan belanja gaji dan tunjangan melekat ASN Daerah sebesar 8% dan dukungan Penggajian PPPK yang telah diangkat oleh Pemda**
- **Penambahan DAK Fisik bersumber dari pergeseran Hibah ke Daerah.**
- **Penambahan DAK Nonfisik karena adanya perubahan target output dan alokasi TPG dan TKG ASND yang memperhitungkan kenaikan gaji.**



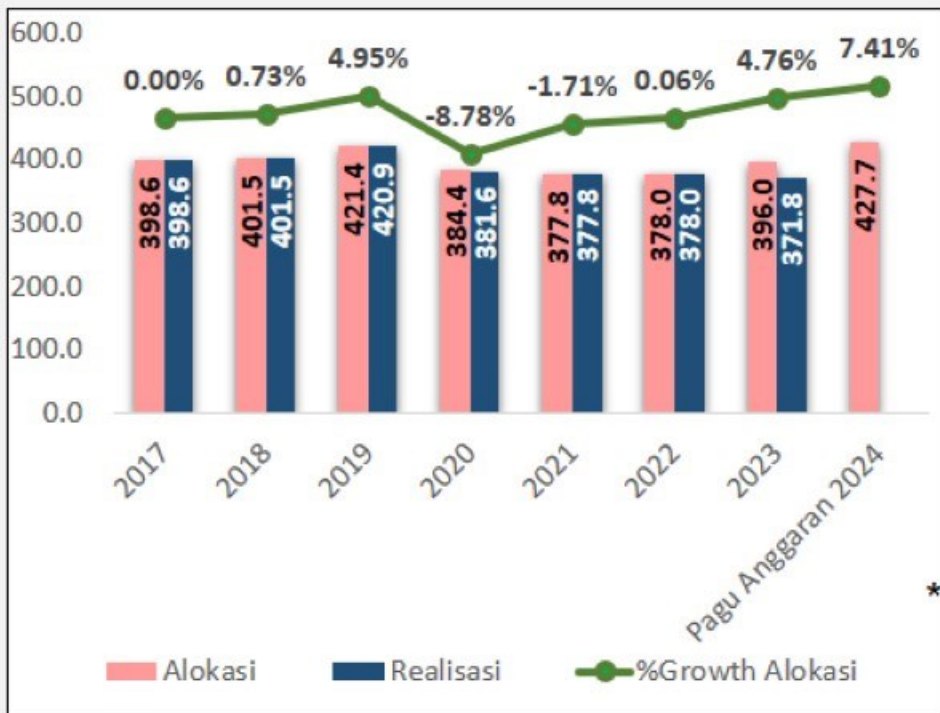
PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM TA 2024

Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah



PERKEMBANGAN DAU TA 2022-2024

Rp Triliun



- ❑ Pagu DAU tahun 2024 tumbuh sebesar 7,4% dari tahun 2023

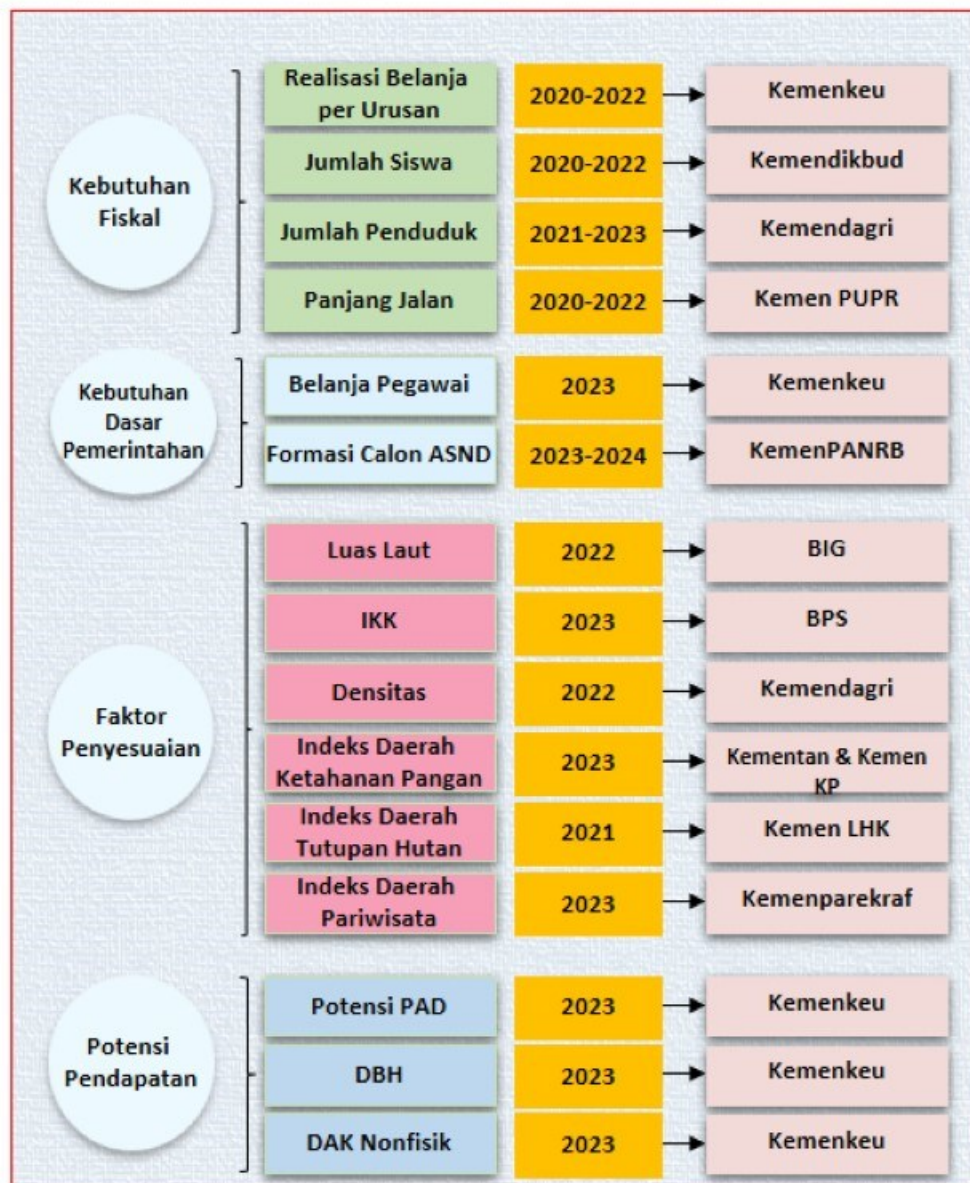
KEBIJAKAN DAU TA 2024

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, diantaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan 2027.
2. **Memperkuat sinergi kebijakan penggunaan DAU yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas nasional** dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja layanan publik Daerah dan belanja strategis daerah termasuk mendukung penggajian atas pengangkatan PPPK di daerah.
3. **Meningkatkan kualitas penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya** melalui penguatan monev, mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah, dan penguatan sinergi dengan K/L.
4. **Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah** melalui penyesuaian bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
5. **Melanjutkan kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan belanja APBD** melalui penyaluran DAU berbasis kinerja.



DATA DASAR & BOBOT PERHITUNGAN DAU TA 2024

DATA DASAR DAU TA. 2024



URAIAN	RAPBN 2023	
PAGU DAU	427.699,30	
ALOKASI PAGU DAU	Provinsi	KAB./KOTA
▪ PROPORSI PEMBAGIAN PAGU DAU	14,1 %	85,9 %
BOBOT VARIABEL PAGU KELOMPOK		
▪ JUMLAH PENDUDUK	50,0%	50,0%
▪ LUAS WILAYAH	50,0%	50,0%
JUMLAH PAGU KELOMPOK (Miliar)		
▪ SUMATERA	17,757.81	98,759.07
▪ JAWA BALI	16,339.90	128,184.79
▪ KALIMANTAN - SULAWESI	15,783.48	82,755.85
▪ NUSRA – MALUKU - PAPUA	10,424.41	57,693.99
BOBOT FAKTOR PENYESUAIAN		
▪ INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	50%	50%
▪ INDEKS DENSITAS	5%	5%
▪ INDEKS KETAHANAN PANGAN	10%	10%
▪ INDEKS PARIWISATA	10%	10%
▪ INDEKS TUTUPAN HUTAN	15%	15%
▪ INDEKS LUAS LAUT (KEPULAUAN)	10%	10%
VARIABEL POTENSI PENDAPATAN		
▪ Potensi PAD	60%	60%
▪ DBH	100%	100%
▪ DAK Nonfisik	80%	80%



PEMBAGIAN ALOKASI DAU 2023 & 2024

**Bagian DAU
Tidak ditentukan
penggunaannya
(Rp286.767,84 M)**

Digunakan sesuai dengan kewenangan
Daerah dan prioritas Daerah

**Alokasi DAU 2023
(396 Triliun)**

**Bagian DAU
Ditentukan
penggunaannya
(Rp109.232,16 M)**

**Bidang Pendidikan
(Rp40.062,75 M)**

**Bidang Kesehatan
(Rp26.031,47 M)**

**Bidang Pekerjaan Umum
(Rp15.725,97 M)**

**Pendanaan Kelurahan
(Rp1.669,98 M)**

**Penggajian Formasi PPPK
(Rp25.742,00 M)**

**Bagian DAU
Tidak ditentukan
penggunaannya
(Rp343,53 T)**

Digunakan sesuai dengan kewenangan
Daerah dan prioritas Daerah

**Alokasi DAU 2024
(427,69 Triliun)**

**Bagian DAU
Ditentukan
penggunaannya
(Rp84,16 M)**

**Bidang Pendidikan
(Rp37.470,69 M)**

**Bidang Kesehatan
(Rp17.141,72 M)**

**Bidang Pekerjaan Umum
(Rp12.182,97 M)**

**Pendanaan Kelurahan
(Rp1.696,00 M)**

**Penggajian Formasi PPPK
(Rp15.676,72 M)**



DAU Dukungan Penggajian Formasi PPPK Daerah



PENGUNAAN

- Digunakan untuk Formasi PPPK 2023 yang diangkat di tahun 2024.
- Terdiri dari Formasi guru, tenaga kesehatan, dan teknis yang masing-masing jumlahnya ditetapkan oleh Kementerian PANRB.
- Tunjangan melekat terdiri dari:
 - a. Tunj. Keluarga;
 - b. Tunj. Struktural;
 - c. Tunj. Umum;
 - d. Tunj. Beras;
 - e. Tunj. Lainnya (iuran JKN, dsb.);
 - f. Pembulatan;

PENGALOKASIAN

jumlah formasi PPPK yang diangkat pada tahun berjalan



Satuan Gaji pokok dan tunjangan melekat



Jumlah bulan pembayaran gaji



Faktor pengali



Alokasi DAU Dukungan Penggajian Formasi PPPK Daerah

Formasi 2023 yang diangkat tahun 2024
(formasi ditetapkan oleh KemenPANRB)

Rata-rata nasional = Rp3.611.000

9 bulan (mulai April) + 1 Gaji Ke-13
(sesuai jadwal seleksi PPPK yg diterbitkan BKN)

Proyeksi kelulusan

TA 2024

Rincian pagu bagian DAU dukungan penggajian PPPK Daerah per Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Besaran faktor pengali mempertimbangkan rata-rata realisasi pengangkatan Formasi tahun sebelumnya.

Besaran satuan gaji dan tunjangan melekat mempertimbangkan rata-rata belanja gaji dan tunjangan melekat Formasi PPPK bulan Juli 2023 (sudah memperhitungkan kenaikan 8%).



KEBIJAKAN DAU TA. 2024 DALAM MENDUKUNG PENGADAAN PPPK

Kenaikan Pagu DAU TA. 2024 diutamakan untuk:
- memenuhi kebutuhan Penggajian PPPK yang diangkat tahun 2023 dan 2024, serta
- Kebutuhan Kenaikan Gaji 8%

Blockgrant

Penggajian PPPK formasi 2022 yang diangkat tahun 2023

Kenaikan Gaji (PNSD dan PPPK) sebesar 8%

Specific Grant

Penggajian PPPK formasi 2023 yang akan diangkat tahun 2024

Diperhitungkan dalam DAU TA. 2023

No	Jenis PPPK		Jumlah
1.	Formasi 2022 (9+2 Bulan)	Guru	320,223
		Nakes	92,151
		Teknis	27,594
		Total	439,968
2.	Formasi 2023 (3 Bulan)	Guru	709,219
		Nakes	185,448
		Teknis	13,193
		Total	907,860



Diperhitungkan dalam DAU TA. 2024

No	Jenis PPPK		Jumlah
1.	Formasi 2022 yang mendapat NIP (12+2 Bulan)	Guru	247,106
		Nakes	62,127
		Teknis	9,076
		Total	318,309
2.	Penetapan baru Formasi 2023 (9+1 Bulan)	Guru	296,059
		Nakes	154,342
		Teknis	42,826
		Total	493,227



REALISASI PENGANGKATAN FORMASI PPPK 2022 dan 2023

Penyerapan DAU Earmarked PPPK TA. 2023

Formasi 2022 diperhitungkan		Formasi PPPK 2022 lulus dan mendapat NIP		Penyaluran DAU Earmarked PPPK 2023	Potensi Sisa DAU Earmarked 2023	Kebutuhan Penggajian di 2024
Jumlah	Keb. Gaji	Jumlah	Keb. Gaji	Keb. Gaji	Keb. Gaji	Keb. Gaji
423,885	16,322,963,580,000	312,248	12,024,045,984,000	2,031,842,292,868	14,291,121,287,132	15,785,385,392,000

- Jika melihat Data Kelulusan PPPK 2022 (yang telah mendapatkan NIP), maka seharusnya DAU Earmarked PPPK Tahun 2023 akan tersalurkan sebesar 12,0 T, namun demikian sampai dengan Desember diperkirakan akan tersalur 2,0 T
- Karena sudah mendapatkan NIP, maka seharusnya PPPK ini diangkat seluruhnya, yang akan mengakibatkan beban penggajian pada tahun 2024 sebesar 15,8 T (diluar DKI Jakarta)

Formasi 2023 diperhitungkan		Formasi PPPK 2023 lulus dan mendapat NIP	Penyaluran DAU Earmarked PPPK 2023	Potensi Sisa DAU Earmarked 2023	Penetapan Baru Jumlah Formasi PPPK 2023	
Jumlah	Keb. Gaji	Keb. Gaji	Keb. Gaji	Keb. Gaji	Jumlah	Keb. Gaji
887,416	9,419,033,424,000	0	0	9,419,033,424,000	491,285	15,676,719,569,000

- Untuk formasi 2023, proses seleksi baru akan berakhir di bulan Maret 2024, sehingga paling cepat dapat diangkat pada bulan April 2024, dengan kebutuhan gaji sebesar 15,7 T yang akan menjadi DAU Earmarked 2024 (diluar DKI Jakarta)



1. Penyaluran dilakukan berdasarkan laporan rencana pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat TA 2024 yang disampaikan pemda kepada Kemenkeu c.q DJPK;
2. Penyaluran dilakukan paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama pada bulan pembayaran gaji;
3. Laporan rencana pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat TA 2024 disampaikan secara bulanan, maksimal tgl 14 pada bulan sebelum bulan pembayaran gaji;
4. Laporan telah melalui reviu APIP;
5. Dalam hal pemda tidak menyampaikan laporan rencana pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat PPPK, DAU dukungan penggajian PPPK daerah tidak disalurkan dan menjadi sisa DAU di RKUN.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”

– Nelson Mandela –

TERIMA

KUATIR

TERIMA

KASIH